

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**MENCARI MODEL KEPEMIMPINAN
PROFETIK TRANSFORMATIF:
MENUJU INDONESIA BERDAULAT**

**Diselenggarakan Dalam Rangka memperingati Dies UNY ke 49
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
13 April 2013**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA FISTRANS	iii
SAMBUTAN DEKAN	v
PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
I. Kontribusi Parpol dalam Mengembangkan Kepemimpinan	
Model Kepemimpinan Profetik Transformatif : Upaya Mencari Model Kepemimpinan yang Ideal dalam Menata Indonesia (Yanuardi)	3
Kontribusi Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengembangkan Kepemimpinan Profetik Transformatif di Indonesia (Hardiyansyah)	8
Muslim Negarawan: Sebuah Refleksi Pemikiran Profetik (Nasiwan)	17
Karakteristik Kepemimpinan Politik Indonesia: Transaksional atau Transformatif? (Utami Dewi)	27
Peran Partai Politik dalam Mengembangkan Kepemimpinan Transformatif (Marita Ahdiyana)	37
<i>Entrepreneurial Leadership</i> : Menuju Transformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi (Kurnia Nur Fitriana)	51
II. Kepemimpinan dalam Perspektif Historis di Indonesia	
Nasionalisme dalam Konsep Kepemimpinan Profetik Transformatif (Kajian Sejarah) (Zulkarnain)	65

MUSLIM NEGARAWAN: SEBUAH REFLEKSI PEMIKIRAN PROFETIK

Nasiwan

Jurusan PKnH, FIS, UNY

Email : nasiwan 3@Gmail.com

Abstrak

Bangsa Indonesia membutuhkan kehadiran profil pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Namun pada sisi realitas politik bangsa ini menyaksikan bahwa selama Indonesia berdiri belum kunjung datang sosok pemimpin yang mampu membawa bangsa ini ke arah kehidupan yang berkemajuan.

Eksperimentasi model kepemimpinan pada era Orde Lama 1959-1966 serta pada era Orde Baru 1966-1998, serta era Reformasi politik pasca tahun 1998, memberikan bacaan belum hadirnya sosok kepemimpinan yang berkarakter negarawan (muslim negarawan) baik pada level nasional maupun lokal yang mampu memberikan inspirasi kemajuan Indonesia. Adalah sebuah keniscayaan hadirnya sosok pemimpin yang mampu membebaskan Indonesia (liberasi) dari berbagai penajajahan baik ekonomi, politik, budaya. Melakukan humanisasi, emansipasi semua langkahnya dikerangkai oleh transendensi.

Kata Kunci: *Politik Profetik, Muslim Negarawan*

Pendahuluan

Penulis memiliki hipotesis bahwa spirit dari diskursus tentang 'Muslim Negarawan', adalah untuk counter hegemoni, dari diskursus 'muslim bukan partisipan dari negara', dan sebaliknya orang Islam (komunitas Islam) memiliki hak yang sama dengan elemen bangsa lainnya untuk memakai predikat negarawan, yang disebut sebagai 'muslim itu negarawan'. Spirit tersebut dapat dibaca sebagai *standing position* untuk melakukan ikhtiar dekonstruksi terhadap diskursus yang selama ini sudah mapan. Diskursus yang diproduksi oleh negara dan para aktor negara yang selama beberapa periode berkemampuan mengelola negara Indonesia.

Muslim Negarawan: Lentera Kecil menuju Politik Profetik

Dari sisi positif *standing position* ini juga dapat dibaca bahwa seorang muslim yang hidup di Indonesia memiliki niatan yang positif untuk memberikan kontribusi demi kebaikan, kemajuan dan kemaslatan bangsa Indonesia. Memberikan kontribusi 'amal sholeh' bagi bangsa Indonesia adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari beramal sholeh bagi ummat manusia, beramal sholeh bagi kemaslatan bangsa Indonesia juga dalam kerangka kemaslatan ummat sebagaimana dianjurkan dan kompatible dengan misi kenabian yakni menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ikhtiar dan kerja-kerja intelektual untuk melakukan pembongkaran terhadap diskursus yang sudah mapan, sangat penting untuk memberikan payung intelektual bagi membuka keterlibatan Muslim dalam menggunakan dan mengelola negara yang bernama Indonesia. Basis argumentasi yang mapan bagi keerlibatan dan hak moral orang Islam dalam menggunakan negara atau bekerja dalam rangka negara sangat penting dan strategis. Hal tersebut antara lain dikarenakan selama Indonesia berdiri ada semacam diskursus yang tidak *balance*, tentang penggunaan kata negarawan, seolah-olah bukan untuk para aktivis Islam, mengapa?

Dalam kontestasi antar ideologi yang hidup di suatu bangsa, khususnya untuk konteks Indonesia dalam waktu yang panjang demikian jika Islam diposisikan sebagai ideologi, sementara itu juga ada ideologi lain seperti nasionalisme, sosialisme, maka kemusliman-keislaman seseorang sering kali menjadi barirer untuk tampil dalam politik Indonesia.

Ideologi Islam yang biasanya dipadankan dengan perjuangan menegakkan syariah Islam (piagam Jakarta), yang diangkat oleh para aktivis Islam khususnya partai-partai Islam, seolah-olah menjadi langkah untuk membentuk citra tidak berhak atau setidak-tidaknya dipertanyakan jika para aktivisnya memakai sebutan negarawan. Pendek kata pintu syariah versus non syariah dalam wacana hampir selalu dimenangkan oleh kelompok non syariah. Para aktivis yang mengusung non syariah seolah lebih berhak menjadi negarawan.

Problematika negara Islam? berkaitan dengan isu syariah Islam, hal ini ada kaitannya dengan problematika Negara Islam. Yakni dengan label negara Islam tidak serta merta ajaran Islam dan ummat Islam menjadi semakin berkualitas, jika Islam itu hanya dijadikan sebagai komoditas saja. Maksudnya Islam hanya dijadikan sebagai mobilisasi loyalitas umat dalam momen-momen politik.

Masuk pada pertanyaan mendasar yang menjadi tema sentral diskusi menurut penulis perlu dipertanyakan, Muslim negarawan mungkinkah? Jawabannya adalah Mengapa tidak? Persoalannya pada sisi empiris politik di Indonesia, oleh berbagai kekuatan politik yang ada, dijumpai suatu realitas politik yang menyatakan kurang lebih bahwa Politik Islam selalu dipersepesi sebagai partisipan, faksional.

Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan wacana peminggiran politik Islam mengapa wacana – pengetahuan kolektif – masyarakat Indonesia berpandangan bahwa Islam itu partisan kelompok tertentu bukan aktor yang pantas mewakili negara. Sekiranya ada aktor dari kalangan Islam yang mewakili negara atau masuk bekerja dalam ranah negara tetap saja ada semacam gugatan atas kenegarawannya. tetap ada tanda tanya?

Mengapa wacana itu melekat? Hal tersebut antara lain dapat dijelaskan melalui struktur pemaknaan politik Islam yang diposisikan hanya sebagai sub dari politik negara, gambaran tersebut antara lain terlukiskan dalam buku klasik karya Lance Caslte dan Herbet Fieth, "Pemikiran Politik Indonesia", dan karya-karya para sarja lain yang datang sesudahnya, berbeda dengan pandangan komunitas Muslim dalam banyak pengajian yang berkeyakinan 'Islam kaffaah' fakta emperisnya belum sejalan dengan keyakinan umat Islam.

Padahal sebagaimana diketahui Wacana itu merupakan software untuk menggiring perilaku konkrit. Hal tersebut didukung oleh adanya kenyataan banyak orang merasa tidak bersalah memiliki pandangan atau setuju dengan pandangan bahwa politik Islam adalah sub dari institusi lain, itu bukti bahwa wacana mengendalikan perilaku.

Warisan sekulerisme hadir di Indonesia dan mengkerangkai cara berfikir kita tentang negara. Bukti adanya kekuatan sekularisme dapat dilacak pada adanya kenyataan terjadinya ketegangan Islam dan nasionalis pada tahun 1950-an yang efeknya masih terasa sampai hari-hari ini. Dalam kontestasi ini ternyata Umat Islam tidak bisa mengendalikan frame yang digunakan untuk mengarahkan masyarakat Indonesia, khususnya para elitnya.

Dengan demikian tidak salah kiranya jika dinyatakan bahwa Muslim negawawan itu merupakan perjuangan pada arus lembut (software) untuk perjuangan diaras lain, seperti ekonomi, politik, kebudayaan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Jika umat Islam tidak berhasil membongkar hegemoni pemikiran – diskursus – yang selama ini bercokol dalam benak pemikiran masyarakat Indonesia maka keberhasilan perjuangan pada aspek lainnya menjadi sempit peluang keberhasilannya. Dalam jangka panjang ketika secara akumulatif diskursus politik kenegaraan tertutup bagi peran-peran aktivis Muslim, maka tinggal soal waktu peran-peran secara real dalam politik kenegaraan akan tertutup.

Bagaimana cara membongkarnya? Pembongkarannya dapat dirunut dengan membaca ulang secara kritis bahwa kehadiran negara kebangsaan 'nation state' yang pada saat nanti menjadi pijakan –lapangan bermain (kompetisi) antara berbagai aktor yang menisbahkan dirinya dengan negara, dalam kehidupan politik modern dikerangkai dengan tatanan sosial yang disebut demokrasi. Dengan kata lain pintu masuk untuk bisa menggunakan insturmen negara secara sah adalah hanya melalui tatanan demokrasi (*the only one game in town*).

Dalam frame nation state yang dirangkai dengan tatanan demokratis peluang pintu masuk untuk menggunakan instrumen negara bagi berbagai

kelompok masyarakat, termasuk masyarakat Islam adalah melalui partai politik. Tidak banyak tersedia pilihan lain kecuali lewat partai politik. Disinilah titik persoalan dan dilema mulai ditemukan. Menagapa yakni karena muslim harus lewat pintu partai, dalam memasuki ranah negara, oleh karenanya menjadi berpeluang dan diberi cap partisan. Tidak merupakan wakil seluruh warga bangsa dan karena hal tersebut menjadi banyak kendala untuk lahir menjadi Muslim Negarawan dari kalangan aktivis Partai Islam di Indonesia.

Menghadapi kondisi yang kompleks ini, kita perlu bertanya masih adakah secercah harapan untuk memulai langkah-langkah dekonstruksi? Dalam pandangan penulis sebenarnya dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia cukup tersedia eksperimen yang bisa menjadi inspirasi untuk melakukan dekonstruksi hegemoni yang memingirkan Islam. Eksperimen yang dimaksud adalah adanya strategi gerakan dakwah politik kultural yang lebih populer dengan istilah kembali ke khittah NU 26. Dalam konteks pembahasan ini gerakan kembali ke khittah 26 dapat dibaca sebagai benih-benih pemikiran agar keislaman seseorang tidak menjadi *barrier* untuk menjadi negarawan di Indonesia (Islam substantial). Demikian juga angka yang sama dilakukan oleh Muhammadiyah dengan kembali ke khittah 1971, serta gerak Dewan Dakwah Indonesia pada era pemerintahan Orba dalam batas tertentu dapat dibaca sebagai untuk melakukan dekonstruksi hegemoni yang memonopoli pengelolaan negara untuk kelompok tertentu.

Mempertimbangkan delimita dan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh ummat Islam mungkin bermanfaat untuk dipertimbangkan suatu pandangan bahwa keislaman itu tidak harus dinilai dari syariah, tetapi keislaman itu dapat dimulai dari sisi akhlak, yang kemudian menjadi kenyataan sosiologis, menjadi perilaku masyarakat yang kemudian pada tahapannya menjadi norma, lembaga, dan struktur sosial, ekonomi dan harus diakomodasi dalam berbagai kebijakan negara.

Partai-partai Islam seperti halnya PKS, PPP dll berada dalam posisi unik karena pada satu sisi masuk wilayah partai siap untuk dicap sektarian tetapi *inline* untuk menjadi negarawan, dengan demikian tingkat kesulitan yang dihadapinya menjadi lebih rumit. Pintu masuk ke wilayah negara bisa melalui organisasi (semisal partai, ormas) dengan demikian kehadirannya dalam ranah negara bukan hanya kebetulan tetapi didisain, dengan segala perlengkapan intelektual yang dibutuhkan.

Dalam konteks ini maka kaderisasi pemimpin perlu dilakukan dengan dua wajah, yakni melalui partai, agar tahu medan politik (keakuan) sebagai kelompok umat, tetapi juga pada saat lain menduduki jabatan simbolik sebagai representasi negara, supaya muncul 'kekamian' keindonesiaan? Apakah partai partai Islam (PKS, PPP, PBB, PAN, PKB) dan lainnya sudah melakukan pengkaderan model itu.

Perlu disadari bahwa negara yang demokratis tidak akan terwujud jika setiap faksi berhenti dan selesai pada berfikir model faksi 'keakuan' saja, melupa-

berfikir kekamian. Memperkuat pernyataan di atas dapat disimak bahwa agenda reformasi yang telah dikumandangkan menjadi berceceran karena hampir setiap orang berfikir keakuan saja (banyak orang membuat partai hanya dalam kerangka keakuan kelompoknya saja) dan ini cermin miskinnya negarawan di Indonesia. Kecenderungan praktek politik sekarang lebih banyak memperagakan pintu politik yang faksionalis

Bagaimana dengan aktor politik yang disebut 'Tentara', tentara dilihat dari sejarahnya itu berasal dari gerakan rakyat. Oleh karenanya TNI legitimitas berpolitik atas nama negara, tetapi ketika berpolitik berubah menjadi faksi yang menyusup melalui DPR pada jaman Orde Baru. Dan baru pada era reformasi kembali sekarang kembali ke barak. Di era pasca reformasi kalau kembali berpolitik tentara berpolitik dengan politik "negara". Patut dicermati pula bahwa ada sinyal-sinyal bahwa tentara seolah-olah membagi peran yakni pensiunan masuk politik sebagai katup pengaman, jika terjadi perkembangan yang tidak diharapkan tentara sudah ada yang berada dalam wilayah politik. Terkait dengan peran sentral tentara perlu dicermati ulang bahwa tawaran format menjadi negarawan ala orde baru, yang berlangsung sekitar 30 tahun adalah bukan melalui partai. Bahkan dengan cara melumpuhkan partai. Seakan memperagakan bahwa kebutuhan Indonesia dikelola oleh tentara melalui lembaga yang zatnya partai tetapi namanya bukan partai. Karena tatanan seperti itu tidak diterima secara luas maka tentara diminta kembali ke barak, tentara profesional tapi juga menghadapi masalah baru tidak punya anggaran.

Bagaimana negarawan secara real ada dalam politik Indonesia? Kiranya dapat dinyatakan bahwa negarawan tidak bisa lepas dari politik. Siapapun yang akan menjadi negarawan harus mampu mengarungi medan politik. Sampai sekarang ini Muslim belum bisa menjadi icon negarawan, karena terjebak politik identitas, politik muslim, dipertontonkan lebih untuk menggalang mobilitas loyalitas secara periodik untuk kursi, politik muslim terseret loyalitas kelompok, tidak menggarap nilai substansi Islam, termasuk politik identitas negara Islam.

Muslim negarawan adalah mengelola negara dengan akhlak Islam. Dalam konteks berfikir negara maka mensubsidi orang miskin melalui birokrasi, melalui dana bersed yang jelas, melalui anggaran, yang kemudian hadir dalam kebijakan, serta standar operasional. *Orang bisa menjadi Indonesia (nasionalis, negarawan)* dan menjadi muslim yang baik. Kecuali ada eksepsi dalam hal aqidah.

Birokrasi selama ini belum bekerja untuk menjadi instrumen negara menjadi orang Islam menjadi negarawan, kalau ada instrumen negara untuk menjalankan membela orang Miskin dan sejenisnya maka berimpit dengan nilai-nilai Islam. Kemudian berujung pada kebijakan publik, tidak disadari oleh partai, seharusnya materi pengkaderan partai menuju agar birokrasi menjadi instrumen bagi membela orang miskin. Negara bisa menjadi instrumen. Bisa di nilai dengan nilai-nilai apapun. Hal tersebut menjadi mungkin jika aktivis partai juga menjadi

social movement dan motor sosial movement bisa dari kalangan partai, betapa indahnya negeri ini kalau menjadi penggerak memproduksi nilai.

Ada kerangka advanced politik dan penguatan negara. Dengan merujuk pada perspektif di atas kiranya perlu disadari bahwa Negara Islam bisa terjatuh pada perilaku membajak negara untuk kepentingan Islam, tetapi kalau akhlak Islam ada lebih dahulu sebagai referensi sosiologis baru dibuat pasalnya, selama ini sering kali diberi nama dulu sementara itu secara sosiologis belum ada.

Di satu sisi ada nilai-nilai konsep yang abstrak di sisi yang lain ada kenyataan bahwa kepemimpinan yang diterima adalah kepemimpinan intelektual leadership, karena itu perlu ada prosedur yang dibakukan, dioperasionalkan. Islam menjadi manifestasi sebagaimana negara, tetapi tidak harus diberi label Islam. Contoh tentang bujating sebagai kholifah para aktivis Islam maka membuat anggaran negara yang memihak kaum dhu'afa, menjaga lingkungan, yang perlu dijabarkan dalam operasionalisasi di birokrasi. Untuk keperluan itu maka analisis dampak lingkungan perlu dipertimbangkan menjadi materi pengkaderan.

Pada akhir tulisan ini kiranya perlu ditegaskan pernyataan bahwa Teologi Islam menjadi referensi dan negara menjadi instrumen untuk mewujudkan, negara bukan untuk sekedar diduduki. Agenda tersebut walaupun tidak langsung dilakukan oleh partai, tetapi bisa menjadi supporting agenda setting. Siapa aktornya? apakah dosen, politisi, pengusaha, kaum profesional, ataukah mejelis syuro, terbuka banyak pilihan.

Simpulan mewujudkan Muslim Negarawan merupakan agenda yang perlu dikawal kedepan. Cara mengawal dengan mempraktekan hal-hal yang bisa diwujudkan, mengaktualkan ajaran Islam secara kontekstual. Supaya kenegarawan Muslim terus bisa dipertahankan maka yang dilakukan bukan hanya mendudukan tokoh Islam tetapi reproduksi wacana Islam yang operasional, semua itu bisa terwujud jika menyepakati framework intelektual leadership, bukan merujuk pada orang tetapi dipimpin oleh ide intelektualitas.

Route pemikiran Cendekiawan Muslim Kuntowijoyo (1943-2005) yang ingin dipaparkan dalam tulisan ini hanyalah pemikiran beliau yang berkaitan dengan tema-tema masalah politik khususnya politik Islam. Pengambilan posisi yang demikian mengingat beberapa pertimbangan pertama karena tema politik adalah merupakan tema kajian yang akrab bagi penulis serta demi memungkinkannya kajian ontologi pemikiran Kuntowijoyo ini menjadi fokus pada engle-engle tertentu, sehingga sajian menjadi enak untuk dinikmati.

Kesan kuat pertama yang ada pada penulis ketika ingin menuliskan pemikiran Kuntowijoyo di bidang pemikiran politik Islam, adalah kokohnya landasan teoritis pemikiran beliau dipadu dengan kejernihan berpikir dan akhirnya mampu melahirkan perspektif alternatif yang ia namakan dengan *Ilmu Sosial Profetik*. Sebagai contoh kecil penulis pernah membaca salah satu tulisan beliau yang dibuat pada tahun 1980-an, tulisan tersebut merefleksikan betapa beliau kokoh dalam penguasaan teori-teori social besar, penulis menemukan tulisannya yang

dimuat di jurnal Prisma tahun 1980-an beliau sudah fasih dengan teori sosial kritis dari Gramsci, Habermas, padahal saat itu masih sedikit pengamat yang menggunakan pemikiran kritis mengingat situasi politik di Indonesia yang berada di bawah regim otoriter Orde Baru.

Kekokohan pijakan kerangka teoritis yang beliau miliki sangat terasa misalnya ketika kita membaca analisis tulisan beliau yang berkaitan dengan masalah perubahan sosial, perubahan budaya dan implikasinya pada perubahan politik. Lebih khusus lagi keterkaitan antara perubahan sosial-budaya dengan pergerakan dan peranan politik umat Islam di Indonesia. Para pembaca dan pemerhati pemikiran politik Islam dapat merasakan betapa Cendekiawan Kuntowijoyo sangat menguasai teori-teori sosial besar dalam bukunya yang sangat monumental yang terbit pada awal tahun 1990-an, *Paradigma Islam*, demikian juga buku "*Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*", yang terbit pada tahun 1994.

Karakteristik lain yang menjadi kelebihan dari pemikiran dan analisis yang dibuat oleh Kuntowijoyo, sejauh yang dapat penulis tangkap adalah dalam *stand of point*, posisi pijak pemikiran Kuntowijoyo sekali pun familier dan fasih mengutip dan menggunakan teori-teori sosial barat tetapi secara substansi gagasan pemikirannya tidak menunjukkan ketundukan pada arus besar pemikiran barat yang sekuler. Kuntowijoyo sebagai intelektual tidak mau menyerah dan tunduk pada mainstream pemikiran yang sekuler bebas nilai. Dan dalam waktu yang sama. Ia juga tidak terjebak pada posisi eksklusif hanya bersedia menjadikan Islam sebagai satu-satunya alternatif pemikiran, tanpa pengayaan dan dialog yang cerdas dengan khazanah pemikiran peradaban dunia lainnya. Menghadapi posisi dunia pemikiran yang cenderung tunduk pada perspektif pemikiran Barat yang sekuler dan bebas nilai, yang tidak sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya (Islam) dari sisi pemikiran Pak kunto, telah melakukan ikhtiar yang cerdas, kreatif dan jernih yaitu dengan gagasannya untuk melahirkan suatu paradigma ilmu yang dapat mempertemukan antara tradisi pemikiran Barat yang rasional dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat industri dan tradisi pemikiran timur yang dekat dengan nuansa religius-mitos sangat kuat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat agraris. Itulah yang beliau sebut dengan nama ilmu sosial profetik.

Dalam pandangan ilmu sosial profetik yang digagas oleh Kunto berpandangan bahwa teks suci Al Qur'an dapat diposisikan sebagai nilai/norma, yang kemudian dapat diturunkan menjadi *grand theory*, *midle theory* sampai ke praxis. Dengan rumusan lain ia menganjurkan agar Umat Islam melakukan proses objektivikasi pada ajaran Islam sehingga dapat diterima secara universal lantaran berpijak pada titik temu nilai-nilai yang objektif yang memang dibutuhkan oleh semua manusia dengan baju primordial agama apapun. Atau dapat juga ditempuh jalan sebaliknya yaitu berangkat dari fenomena dan fakta sosial politik yang ada kemudian didialogkan dengan teks normatif al Qur'an. Pemikiran Kuntowijoyo tentang objektivikasi Islam dapat dicermati pada bukunya "*Identitas*

Politik Umat Islam", khususnya pada Bab VI dan VII yang secara mendalam tema objektivikasi Islam. Buku ini terbit bulan Juni tahun 1997, oleh penerbit Mizan, beberapa saat sebelum bergulirnya era reformasi, dimana munculnya fenomena bersemunya musim kebebasan untuk mendirikan partai politik, termasuk juga tumbuhnya partai-partai politik Islam.

Dalam pandangan Kuntowijoyo bahwa dalam politik umat Islam seperti penumpang prahu yang berlayar di laut lepas, tanpa bintang tanpa kompas, tidak tahu tujuan dan tidak tahu cara berlayar.⁴ Kunto menuliskan bahwa kepentingan politik Umat Islam bukan hanya kekuatan moral, tetapi politik adalah kekuatan pemaksa (*coercion*) dan bukan hanya sekedar kekuatan moral. Politik menyangkut *publik policy*, bukan kesalahan personal.⁵ Adapun aspek-aspek dari kepentingan politik Umat Islam meliputi aspek moralitas, perubahan struktural, mekanisme politik, reorientasi psikologi. Strategi yang diusulkan oleh Kunto untuk mencapai kepentingan politik Umat Islam adalah melalui tiga strategi yaitu struktural, kultural dan mobilitas sosial.

Kuntowijoyo tidak secara spesifik menyebut strategi perjuangan Islam melalui instrumen partai politik, juga tidak memasukan dalam strategi perjuangan umat melalui jalur struktural. Hal ini nampaknya sesuai dengan keyakinan teoretis Kunto, bahwa pada era sekarang seharusnya umat Islam sudah berpindah dari perjuangan yang berpijak pada mitos dan ideologi ke perjuangan yang berbasis pada ilmu. Posisi pandangan Kunto ini jika ditelusuri konsisten sejak awal pemikiran beliau sampai tahun-tahun akhir kehidupan Beliau sebagai intelektual Islam. Hal tersebut misalnya dapat kita baca pada orasi/pidato ilmiah untuk pengukuhan guru besar Kuntowijoyo, dibidang ilmu sejarah tahun 2001, Kuntowijoyo tetap konsisten dengan pendiriannya bahwa pentingnya umat Islam menyadari tahapan-tahapan perkembangan sejarah yang mengharuskan dilakukannya reorientasi strategi perjuangan umat dari berbasis pada ideologi bergeser pada paradigma Islam sebagai Ilmu. Menurut hemat penulis, mengingat pandangan Kuntowijoyo tersebut dikemukakan di forum ilmiah yang sangat penting maka nampaknya hal tersebut dapat juga dimaknai sebagai pandangan khususnya dalam hal pemikiran politik Islam, keterkaitannya dengan konteks dinamika sejarah umat Islam yang memformulasikan paradigma Islam sebagai ilmu sudah selesai (*khatam*) dan tidak akan mengalami perubahan pandangan yang berarti sampai akhir hayatnya.

Dengan kata lain, partai politik Islam, lebih kental nuansa simbol dan ideologinya maka beliau tidak memberikan rekomendasi untuk berjuang melalui partai Islam, tentu mempunyai argumen untuk posisi pandangannya ini. Kuntowijoyo memberikan rekomendasi untuk berjuang melalui partai politik yang secara substantif memperjuangkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, pembelaan pada orang tertindas, pemberantasan korupsi, pembelaan kaum perempuan,

⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, hlm. 219

⁵ *Ibid.*, hlm. 206

kebebasan berpendapat, berpolitik dan lain-lain. Tetapi bukan partai politik yang secara vulgar mengeksploitasi simbol-simbol Islam. Posisi pandangan Kuntowijoyo ini tentu bertentangan dengan pandangan tokoh-tokoh Islam yang berpandangan pentingnya berjuang melalui partai Islam. Untuk menilai pandangan mana yang benar, sejarahlah yang akan memberikan jawabannya kepada kita.

Dalam kaitannya dengan posisi politik ummat Islam secara makro Kuntowijoyo telah meninggalkan warisan pemikiran yang merupakan embrio dari ilmu sosial profetik. Beliau mencoba untuk melakukan teoritisasi tentang politik Islam dari Al Qur'an surat Ali Imron ayat 104 dan 110 serta surat Fushilat ayat 51-53. Dari teks normatif tersebut dapat diambil semacam proposisi aksioma. Bahwa kejayaan suatu ummat akan ditentukan oleh empat hal mendasar; *pertama*, tentang adanya kesadaran sejarah (untuk mengambil 'itibar); *kedua*, pentingnya untuk melakukan upaya emansipasi (*al amr bil ma'ruf*); yang *ketiga*, kehasratan melakukan liberasi, pembebasan manusia dari kejahatan (*anahy 'anil munkar*); *keempat*, pentingnya melakukan transendensi (*tu'minuna billah*). Berdasarkan nilai aksiomatik yang diambil dari ayat di atas maka Islam dan umat Islam seharusnya mampu memenangkan pertarungan menjadi ummat terbaik tidak berada dalam dominasi dan posisi ketundukkan pada ideologi kapitalisme ataupun sosialisme seperti dialami oleh umat Islam semenjak beberapa abad semenjak lebih khusus lagi setelah terjadinya revolusi industri abad 16 di negara barat.

Dari gap antara realitas politik umat Islam dengan proposisi yang ada dalam teks normatif kemudian dapat disusun suatu pertanyaan mengapa ummat Islam mengalami keterbelakangan, kemunduran, kekalahan? Jawaban atas pertanyaan sentral ini dapat dipandu dan diturunkan dari nilai-nilai normatif teks Al Qur'an dengan kombinasi dari data real dan fenomena sosial, politik penyebab kemunduran dan keterbelakangan ummat Islam. Persoalan besar tadi dapat dirinci dalam pertanyaan yang lebih spesifik apa penyebab kemunduran ummat Islam? Apakah faktor pemahaman dan kesadaran Islam yang lemah telah dipersepsikan oleh ideologi kapitalisme dan sosialisme pada hampir seluruh aspek kehidupannya sehingga pada kenyataannya ummat Islam telah jauh dari Islam, sehingga sebenarnya yang bertarung dalam realitas politik dan ekonomi bukan lagi antara Islam dengan ideologi kapitalisme ataupun sosialisme. Tetapi antara ummat Islam yang tidak memiliki ideologi dengan bangsa barat yang sangat yakin dengan ideologi kapitalisme yang sudah diperjuangkan semenjak abad pencerahan dengan pengorbanan yang sangat besar baik tenaga, pikiran bahkan nyawa. Ataupun kemunduran tersebut lebih karena faktor intrumental karena ummat Islam tidak menguasai ilmu dan teknologi. Atau bahkan kelemahan ummat Islam ada pada dua faktor itu sekaligus yakni kelemahan pada pemahaman Islam yang sudah tercerabut dan banyak friksi serta tidak menguasai dan menggunakan ilmu dan teknologi.

Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa kemunduran politik ummat Islam dalam persaingan secara makro adalah lebih sebagai konsekuensi dan kelemahan pada penguasaan pemahaman keislaman dan kesadaran sejarah dan instrumen. Maka langkah perbaikan yang perlu dipertimbangkan adalah perbaikan pada kedua aspek itu sekaligus. Pendalaman pada ajaran Islam tanpa menafikan dan kemaun untuk belajar hal-hal yang berdifat instrumental dan berkah kemajuan Barat.

Dalam konteks pemikiran yang makro ini maka kiranya dapat dipahami mengapa sampai akhir hayatnya Kunto, tetap istiqomah dengan pilihan strategi perjuangan ummat Islam melalui jalur Islam kultural beliau tidak terlalu memberikan rekomendasi pada ummat Islam untuk melakukan pilihan perjuangan melalui jalur struktural atau yang lebih populer dikenal melalui jalur politik, Islam politik.

Penutup

Dalam pandangan Kunto, sepanjang bacaan yang dapat ditelusuri oleh penulis, ada beberapa keterbasan pilihan perjuangan melalui jalur partai politik yaitu; 1. Pilihan perjuangan melalui jalur partai politik membuka peluang untuk merusak soliditas ummat Islam karena terkotak-kotak dalam berbagai partai dan friksi; 2. Pilihan perjuangan melalui partai politik akan menggeser alokasi sumber daya ummat tersedot kepolitik dan berpeluang menelantarkan pembinaan di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, moral dll; 3. Pilihan melalui jalur partai politik bisa mendorong munculnya pemikiran yang hanya berjangka pendek-kerdil dan miskin pemikiran yang memiliki visi jangka panjang; 4. Pilihan perjuangan melalui jalur politik tidak dapat diandalkan untuk memberikan solusi pada persoalan kompleks yang dihadapi oleh ummat Islam; 5. Pilihan perjuangan melalui jalur politik dengan mengabaikan pembinaan aqidah, infrastruktur intelektual ummat sebagaimana dibuktikan oleh sejarah (kasus dilarangnya partai Masyumi) tidak akan mencapai kesuksesan; 6. Dalam sejarah modern belum ada bukti empiris yang meyakinkan bahwa ummat ini akan meraih kejayaan yang menyeluruh dengan menggunakan partai politik sebagai instrumen perjuangan.